





















Dari hasil penelitian di lapangan pada kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan memperlihatkan bahwa mekanisme kerja diberikan sepenuhnya kepada pihak pertama. Jadi pihak pertama memberikan kontribusi kerja paling besar, mulai dari penanaman, penyulaman, penyiangan, pemupukan, pengairan sampai panen semua dikerjakan oleh pihak pertama. Dengan demikian pembagian hasilnya pihak pertama mendapat lebih besar dari pihak kedua. Hal ini sudah disepakati dari awal akad kerjasama.

Dalam hal pembagian keuntungan yang dilakukan dalam kerjasama ini dianggap tidak sah, karena pada kesepakatan awal kerjasama, disepakati bahwa pembagian keuntungan sudah ditentukan besar nominal yang harus diterima oleh pihak kedua yaitu 15% dari modal. Jadi, jumlah bagian yang diterima oleh pihak kedua tidak bertambah meskipun kerjasama mengalami keuntungan yang besar. Sistem bagi hasil berdasarkan *syirkah* harus berdasarkan keuntungan bukan dari modal. Dengan demikian sistem bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan bukanlah bagi hasil dalam *syirkah* tetapi menggunakan sistem bunga (tambahan), karena penentuannya dibuat pada waktu akad. Sedangkan bunga merupakan riba yang dilarang oleh syariat Islam.

Dalam bertani tidak selamanya selalu mengalami untung. Karena gagal panen merupakan hal yang wajar dalam melakukan usaha bertani. Begitu juga

dalam kerjasama pertanian melon yang dilakukan oleh pihak pertama dengan pihak kedua.

Pembagian tanggungan dalam kerjasama pertanian melon di Desa Trebungan jika mengalami kerugian adalah hanya salah satu pihak yang menanggung kerugian yaitu pihak pertama. Dan pihak pertama harus mengembalikan modal dan 15% dari modal yang disertakan oleh pihak kedua. Hal itu tidak sesuai dengan bagi hasil dalam *syirkah*, dimana kerugian ditanggung oleh para pihak.

Ulama Hanabilah dan Syiah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua belah pihak yang berserikat boleh mendapatkan keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut kesepakatan mazhab-mazhab.

Apabila kedua belah pihak menetapkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka kesepakatan mereka tidak ada nilainya, dimana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan, bukan mengikuti kesepakatan mereka. Pembagian beban kerugian berdasarkan pada nilai modal yang disertakan. Karena badan tidak bisa menanggung kerugian harta, selain kerugian tenaga yang dikeluarkannya. Sehingga kerugian hanya ditanggung oleh harta, dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi para pihak yang berserikat. Serikat merupakan transaksi *wakālah*, sedangkan hukum *wakālah* mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa menanggung kerugian.









